

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target Pendapatan Daerah dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2012 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan pembiayaan.

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana

Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Jambi tidak membuat kebijakan terhadap sumber penerimaan baru, akan tetapi lebih mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah pada tahun sebelumnya 2011 adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah dan Tarif yang diatur didalamnya terdiri dari :
 - Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Air Permukaan
 - Pajak Rokok
2. Penerapan Samsat Keliling, dimana Samsat Keliling ini adalah bentuk pelayanan prima yang dilakukan oleh petugas Samsat di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota untuk mendekati Wajib Pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

3. Pembentukan Pos Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, pada Tahun 2011 telah dibangun 4 (empat) pos Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yakni :

- Pos Pelayanan di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo
- Pos Pelayanan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi
- Pos Pelayanan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
- Pos Pelayanan di Kecamatan Tempino Kabupaten Muaro Jambi

4. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, adalah suatu upaya untuk menghapuskan pajak dan denda terhadap Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor. 2 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 dan Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011. Pelaksanaannya selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2011. Hal ini berdampak positif terhadap penerimaan pajak tersebut, yaitu terealisasi sebesar Rp46.838.816.702,00 dan ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5. Pelaksanaan Pajak Progresif, yang bertujuan untuk :

- Menjaring Bea Balik Nama bagi pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu (BBN-II).
- Meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Perhitungan besaran jumlah pajak yang terhutang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah. Pajak Progresif ini mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2011.

6. Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Luar Daerah, dengan tarif 0% mulai dilaksanakan tanggal 1 November 2011 sampai dengan 31 April 2012.

7. Razia rutin kendaraan bermotor, kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Pendapatan Provinsi Jambi bekerjasama dengan kepolisian dan PT. Jasa Raharja. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-II. Dalam pelaksanaannya Tim menjaring pemilik kendaraan yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kendaraan dengan nomor polisi luar Provinsi Jambi yang beroperasi di Provinsi Jambi.

Dengan tetap menjalankan kebijakan sebagaimana tersebut, maka untuk menjaga kesinambungan peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2012 diambil langkah-langkah kebijakan strategis yang antara lain meliputi, *pertama*; melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, *kedua*; melakukan *updating* data sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Dana Perimbangan, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum, *ketiga*; meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan, *keempat*; mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatannya, terutama yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah, hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan khususnya pada sisi pajak daerah selama tahun 2012.

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Selama tahun 2012 pendapatan daerah memperlihatkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan yang mengalami peningkatan sebesar 122,08% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.181.289.285.429,00 terealisasi sebesar Rp2.662.866.047.836,17. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi meningkat sebesar 28,10% yaitu dari Rp2.078.806.913.790,83 pada tahun 2011 menjadi Rp2.662.866.047.836,17 pada tahun 2012.

Peningkatan pendapatan atau pelampauan target pendapatan pada tahun 2012 tersebut, terdapat pada pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar 132,14 persen atau melebihi target sebesar Rp242.101.069.173,94 dari target yang ditetapkan sebesar Rp753.366.207.083,00. Untuk pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan terjadi pelampauan target sebesar 123,53 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.085.733.978.686,00. Sementara untuk realisasi pendapatan yang sumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah hanya mencapai 95,33 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp342.189.099.660,00.

Dari total pendapatan Provinsi Jambi pada tahun 2012 yang mencapai Rp2.662.866.047.836,17, masih terlihat bahwa Dana Perimbangan masih menjadi sumber pendapatan utama daerah, dimana sebesar 50,37 persen atau sebesar Rp1.341.202.292.809,23 pendapatan Provinsi Jambi bersumber dari Dana Perimbangan. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 37,38 persen atau sebesar

Rp995.467.276.256,94, sementara pendapatan yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah memberikan kontribusi sebesar 12,25 persen atau sebesar Rp326.196.478.770,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2012

No	Pendapatan	2011	2012 ^{*)}	Perubahan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah			
	Target	641.658.215.660,00	753.366.207.083,00	17,41
	Realisasi	984.232.579.912,83	995.467.276.256,94	1,14
	Lebih (Kurang)	342.574.364.252,83	242.101.069.173,94	
	Realisasi (%)	153,39	132,14	
2	Dana Perimbangan			
	Target	951.272.564.020,00	1.085.733.978.686,00	11,24
	Realisasi	1.050.472.119.996,00	1.341.202.292.809,23	24,74
	Lebih (Kurang)	99.199.555.976,00	255.468.314.123,23	
	Realisasi (%)	110,43	123,53	
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah			
	Target	18.000.000.000,00	342.189.099.660,00	1.801,05
	Realisasi	19.366.613.882,00	326.196.478.770,00	1.584,32
	Lebih (Kurang)	1.366.613.882,00	-15.992.620.890,00	
	Realisasi (%)	107,59	95,33	
	Jumlah Pendapatan Daerah			
	Target	1.635.666.379.680,00	2.181.289.285.429,00	33,36
	Realisasi	2.078.806.913.790,83	2.662.866.047.836,17	28,1
	Lebih (Kurang)	443.140.534.110,83	481.576.762.407,17	
	Realisasi (%)	127,09	122,08	

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi

*) Data Sementara

Dari Tabel 3.1 tersebut, memperlihatkan bahwa peningkatan terbesar pendapatan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1.584,32 persen, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) dijadikan sumber pendapatan sedangkan pada tahun 2011 BOS tidak menjadi sumber pendapatan

provinsi, akan tetapi merupakan dana transfer ke kabupaten/kota. Selanjutnya peningkatan yang relatif besar juga terjadi pada pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 24,74 persen, sementara peningkatan pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar 1,14 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, relatif rendahnya peningkatan PAD tersebut salah satunya merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah yang menurunkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dari 7,5 persen menjadi 5 persen. Sehingga kebijakan ini secara signifikan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap rendahnya realisasi pendapatan yang bersumber dari PAD.

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah Daerah

Secara umum pendapatan pajak daerah masih memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana dari total PAD sebesar Rp995.467.276.255,94,- diperoleh dari pendapatan yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp808.258.511.161,00 atau sebesar 81,19 persen disumbang oleh pajak daerah. Seterusnya secara berurutan PAD bersumber dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp143.821.253.562,22 atau setara dengan 14,45 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah memberikan sumbangan sebesar Rp29.984.605.701,72 atau sebesar 3,01 persen, sedangkan pendapatan yang bersumber dari hasil retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp13.402.905.831,00 atau sebesar 1,04 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2011 – 2012

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		Proporsi Realisasi (%)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Pendapatan Pajak Daerah	532.512.574.000,00	645.317.579.667,00	838.851.529.199,00	808.258.511.161,00	85,23	81,19
Hasil Retribusi Daerah	7.462.787.500,00	11.162.182.916,00	10.195.268.389,00	13.402.905.831,00	1,04	1,35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.106.827.350,00	9.606.827.350,00	21.703.148.707,92	29.984.605.701,72	2,21	3,01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.576.026.810,00	87.279.617.150,00	113.482.633.616,91	143.821.253.562,22	11,53	14,45
Jumlah	641.658.215.660,00	753.366.207.083,00	984.232.579.912,83	995.467.276.255,94	100,00	100,00

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa, secara total terjadi peningkatan PAD dari tahun 2012 jika dibandingkan dengan 2011. Pada tahun 2012 realisasi PAD Provinsi Jambi meningkat sebesar 1,14 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011. Sementara untuk pajak daerah pada Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 3,65 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011. Akan tetapi untuk sumber pendapatan lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar 38,16 persen. Hasil retribusi daerah meningkat sebesar 31,46 persen dan untuk lain-lain PAD yang sah meningkat sebesar 26,73 persen.

3.1.2.2 Dana Perimbangan

Selama tahun 2012 penerimaan dari Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah terealisasi sebesar Rp1.341.202.292.809,23 atau mencapai 123,53 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.085.733.978.686,00. Dari tiga sumber tersebut, pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami pelampauan target yang cukup tinggi jika

diabndingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dimana pada tahun 2012 target penerimaan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bukan pajak ditetapkan sebesar Rp321.108.416.686,00 terealisasi sebesar Rp576.140.512.809,23 atau terealisasi sebesar 179,42 persen. Sementara untuk sumber lainnya relatif sama antara realisasi dan target yang telah ditetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Table 3.3 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2011-2012

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		Proporsi Realisasi (%)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	367.390.151.020,00	321.108.416.686,00	466.589.706.996,00	576.140.512.809,23	43,40	42,96
Dana Alokasi Umum	583.882.413.000,00	731.952.242.000,00	583.882.413.000,00	731.952.242.000,00	54,30	54,57
Dana Alokasi Khusus	24.735.600.000,00	32.673.320.000,00	24.735.600.000,00	33.109.538.000,00	2,30	2,47
Jumlah	976.008.164.020,00	1.085.733.978.686,00	1.075.207.719.996,00	1.341.202.292.809,23	100,00	100,00

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa sama dengan tahun sebelumnya, dana alokasi umum memberikan porsi yang tertinggi dari penerimaan dana perimbangan Provinsi Jambi, yaitu sebesar 54,57 persen, selanjutnya adalah bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 42,96 persen dan dana alokasi khusus sebesar 2,47 persen. Selanjutnya Tabel 3.3 tersebut juga menunjukkan secara total terjadi peningkatan sebesar 24,74 persen penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan. Peningkatan tertinggi terjadi pada dana alokasi khusus yaitu sebesar 33,85 persen, dana alokasi umum meningkat sebesar 25,36 persen dan untuk bagi hasil pajak/bukan pajak meningkat sebesar 23,48 persen.

3.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada tahun 2012 penerimaan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah untuk Provinsi Jambi ditargetkan sebesar Rp342.189.099.660,00 dan terealisasi sebesar Rp325.566.478.770,00 atau sebesar 95,14 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2010-2011

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		Proporsi Realisasi (%)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Hibah	-	1.161.409.660,00	466.589.706.996,00	1.181.988.770,00	96,29	0,36
Dana Penyesuaian	18.000.000.000,00	341.027.690.000,00	18.000.000.000,00	324.384.490.000,00	3,71	99,64
Jumlah	18.000.000.000,00	342.189.099.660,00	484.589.706.996,00	325.566.478.770,00	100,00	100,00

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Dari sisi penerimaan pembiayaan pada tahun 2011 diperoleh dari SiLPA tahun lalu (Tahun Anggaran 2010) sebesar Rp303.260.384.896,35, sedangkan penerimaan penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang tidak terjadi transaksi. Sementara untuk tahun 2012 (data sementara), penerimaan pembiayaan sebesar Rp585.565.934.444,85. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5. Perkembangan Pembiayaan Periode 2011-2012

Uraian	2011		2012 ^{*)}	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Surplus/ (Defisit)	303.260.384.056,35)	328.565.057.630,50	-585.283.394.444,85	104.407.860.180,71
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan	353.260.384.056,35	353.260.384.896,35	631.825.442.526,85	31.817.442.526,85
SiLPA tahun anggaran Sebelumnya	353.260.384.056,35	353.260.384.896,35	631.825.442.526,85	631.817.442.526,85
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	46.541.508.082,00	46.251.508.082,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	40.290.000.000,00	40.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	-	-	6.251.508.082,00	6.251.508.082,00
Pembiayaan Netto	303.260.384.056,35	303.260.384.896,35	585.283.934.444,85	585.565.934.444,85
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	-	631.825.442.526,85	-	689.973.794.625,56

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi

*) Data Sementara

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa untuk kurun waktu Tahun 2011 terdapat surplus pada APBD Provinsi Jambi sebesar Rp328.565.057.630,50 yang merupakan selisih pendapatan Rp2.078.806.913.790,83 dengan jumlah belanja baik yang bersumber dari belanja langsung dan maupun belanja tidak langsung sebesar Rp1.750.241.856.160,33. Sedangkan untuk tahun 2012 surplus APBD Provinsi Jambi berjumlah Rp104.407.860.180,71 yang merupakan selisih antara pendapatan Rp2.662.866.047.836,17 dengan belanja Rp2.558.458.187.655,46.

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD pada dasarnya merupakan instrumen untuk terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dengan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

3.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Program Prioritas Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya yang dijabarkan dalam APBD Provinsi Jambi dengan mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada seluruh SKPD dengan satuan standar tertinggi. Pada tahun 2012 untuk total belanja ditargetkan Rp2.766.573.219.873,85 yang terdiri dari target Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp1.295.848.887.154,85 atau setara dengan 46,84 persen dari total target belanja sedangkan untuk target Belanja Langsung sebesar Rp1.470.724.332.719,00 atau setara dengan 53,16 persen dari total target belanja.

Dari total target sebesar Rp2.766.573.219.873,85 tersebut, terealisasi sebesar Rp2.558.458.187.655,46 atau terealisasi 92,48 persen, dimana untuk realisasi Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp1.194.875.358.485,46 atau setara dengan 46,70 persen dan untuk Belanja Langsung Rp1.363.582.829.170,00 atau setara dengan 53,30 persen, selanjutnya jika dibandingkan antara target dan realisasi baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja Langsung pada tahun tahun 2012 menunjukkan perencanaan penganggaran yang relatif cukup baik, dimana realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai tingkat realisasi sebesar 92,21 persen, begitu juga dengan tingkat realisasi Belanja Langsung yang mencapai 92,72 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011–2012

NO	BELANJA	2011	2012 ^{*)}	Perubahan (%)
1.	Belanja Tidak Langsung			
	Target (Rp)	809.763.763.276,35	1.295.848.887.154,85	60,03
	Realisasi (Rp)	760.339.471.745,83	1.194.875.358.485,46	57,15
	Lebih/Kurang (Rp)	-49.424.291.530,52	-100.973.528.669,39	
	Realisasi (%)	93,9	92,21	
2.	Belanja Langsung			
	Target (Rp)	1.129.163.000.460,00	1.470.724.332.719,00	30,25
	Realisasi	989.902.384.414,50	1.363.582.829.170,00	37,75
	Lebih (kurang)	-139.260.616.045,50	-107.141.503.549,00	
	Realisasi (%)	87,67	92,72	
	Jumlah Belanja			
	Target (Rp)	1.938.926.763.736,35	2.766.573.219.873,85	42,69
	Realisasi	1.750.241.856.160,33	2.558.458.187.655,46	46,18
	Lebih (kurang)	-188.684.907.576,02	-208.115.032.218,39	
	Realisasi (%)	90,27	92,48	

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi

* Data sementara

Selanjutnya tabel di atas juga memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan anggaran yang cukup besar pada Belanja Tidak Langsung, jika Belanja Tidak Langsung tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp809.763.763.276,35 meningkat sebesar 60,03 persen atau meningkat sebesar Rp1.295.848.887.154,85. Sedangkan realisasinya juga meningkat dari Rp760.339.471.745,83 pada tahun 2011 menjadi Rp1.194.875.358.485,46 atau setara dengan 57,15 persen pada tahun 2012.

Selanjutnya dari total anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan wajib dianggarkan sebesar Rp2.594.590.259.211,85 dengan tingkat realisasi sebesar Rp2.399.665.054.772,46 atau setara dengan 92,49 persen dan untuk urusan pilihan dianggarkan sebesar Rp171.982.960.662,00 yang terealisasi Rp158.793.132.883,00 atau setara dengan 92,33 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Dirinci Perurusan
Tahun 2012

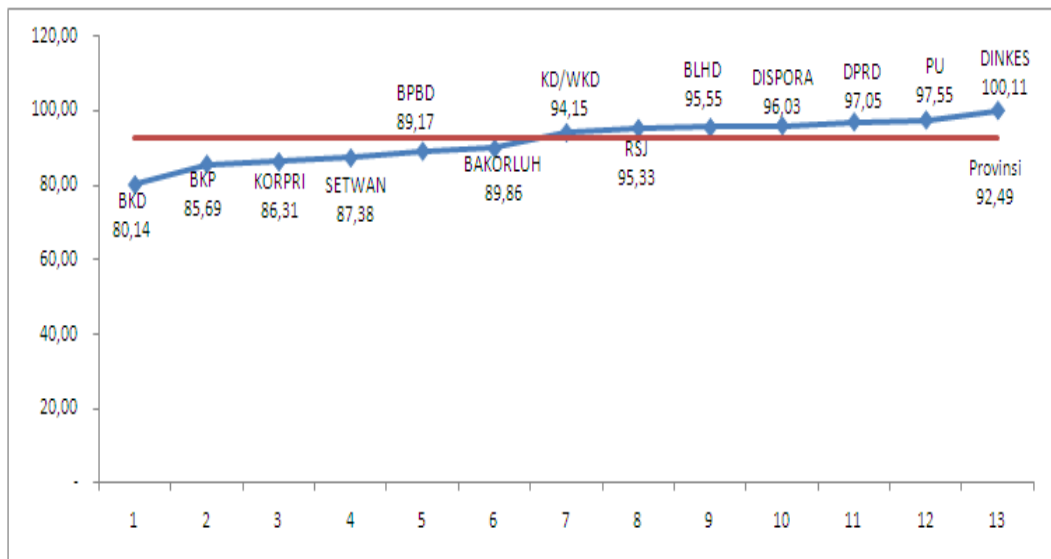
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Urusan Wajib	2.594.590.259.211,85	2.399.665.054.772,46	92,49
Urusan Pilihan	171.982.960.662,00	158.793.132.883,00	92,33
Jumlah	2.766.573.219.873,85	2.558.458.187.655,46	92,48

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi (Data Diolah)

Pelaksanaan Anggaran Belanja Urusan Wajib pada tahun 2012 sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3.11 di atas, dari rata-rata realisasi sebesar 92,49 persen tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi merupakan unit kerja dengan tingkat realisasi tertinggi, yaitu sebesar 100,11 persen dan Badan Kepegawaian

Daerah dengan tingkat realisasi terendah, yaitu sebesar 80,14 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Grafik Realisasi Pelaksanaan Anggaran Urusan Wajib Tahun 2012



Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi (Data Diolah)

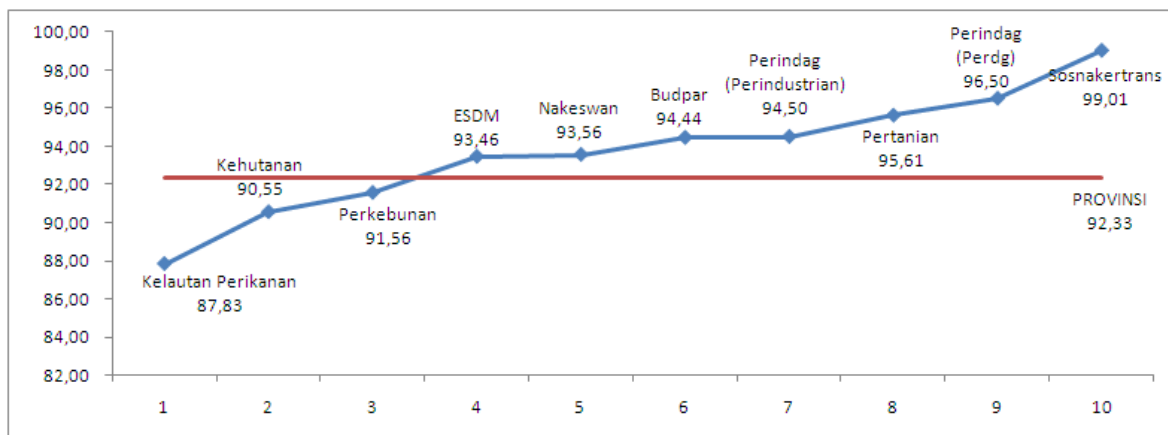
Gambar di atas memperlihatkan bahwa terdapat 6 (enam) unit kerja yang tingkat realisasinya berada di bawah rata-rata atau dengan tingkat realisasi di bawah 90,00 persen. Sementara untuk realisasi di atas 95,00 persen terdapat pada 7 (tujuh) SKPD. Untuk lebih lengkapnya realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib per SKPD Tahun 2012

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)
Dinas Pendidikan Provinsi Iambi	221.054.053.578,00	201.552.401.266,00	(19.501.652.312,00)	91,18
Dinas Kesehatan Provinsi Iambi	51.197.230.525,00	51.251.817.994,00	54.587.469,00	100,11
Rumah Sakit Daerah Provinsi Iambi	140.355.774.513,00	132.664.299.694,00	(7.691.474.819,00)	94,52
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Iambi	33.642.269.508,00	32.069.590.945,00	(1.572.678.563,00)	95,33
Dinas Pekerjaan Umum	633.171.578.003,00	598.545.999.439,00	(34.625.578.564,00)	94,53
Dinas Pekerjaan Umum	55.678.938.000,00	54.313.288.927,00	(1.365.649.073,00)	97,55
BAPPEDA	23.715.373.256,00	22.265.901.368,00	(1.449.471.888,00)	93,89
Dinas Perhubungan	44.233.569.193,00	41.577.003.636,00	(2.656.565.557,00)	93,99
Badan Lingkungan Hidup	11.938.806.480,00	11.408.006.186,00	(530.800.294,00)	95,55
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan	13.137.395.435,00	12.350.514.873,00	(786.880.562,00)	94,01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.556.905.280,00	6.738.348.409,00	(818.556.871,00)	89,17
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.495.047.270,00	37.079.944.891,00	(2.415.102.379,00)	93,89
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	15.001.864.816,00	13.694.209.154,00	(1.307.655.662,00)	91,28
BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu	8.289.151.915,00	7.639.755.450,00	(649.396.465,00)	92,17
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.828.023.272,00	17.561.332.371,00	(1.266.690.901,00)	93,27
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	30.754.438.213,00	29.532.316.774,00	(1.222.121.439,00)	96,03
Satuan Polisi Pamong Praja	14.710.607.585,00	13.861.359.570,00	(849.248.015,00)	94,23
Badan Kesbangpol	9.197.179.818,00	8.662.671.475,00	(534.508.343,00)	94,19
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.028.078.650,00	10.702.738.678,00	(325.339.972,00)	97,05
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.563.983.480,00	1.472.464.043,00	(91.519.437,00)	94,15
Sekretariat Daerah	998.451.081.816,85	904.798.183.768,46	(93.652.898.048,39)	90,62
Sekretariat Dewan	38.329.029.287,00	33.492.449.046,00	(4.836.580.241,00)	87,38
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.580.967.750,00	8.982.152.342,00	(598.815.408,00)	93,75
Inspektorat Provinsi	12.790.772.215,00	12.090.927.498,00	(699.844.717,00)	94,53
Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Iambi	13.452.569.903,00	12.311.481.060,00	(1.141.088.843,00)	91,52
Dinas Pendapatan Provinsi Iambi	56.690.591.502,00	51.509.820.805,00	(5.180.770.697,00)	90,86
Sekretariat KORPRI	3.791.296.835,00	3.272.113.182,00	(519.183.653,00)	86,31
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	15.911.748.601,00	14.836.947.330,00	(1.074.801.271,00)	93,25
Badan Kepegawaian Daerah	17.413.205.666,00	13.954.837.481,00	(3.458.368.185,00)	80,14
KPID	3.869.898.529,00	3.620.137.924,00	(249.760.605,00)	93,55
Kantor Pengolahan Data Elektronik	9.239.355.121,00	8.693.939.682,00	(545.415.439,00)	94,10
Badan Perpustakaan dan Arsip	11.047.680.441,00	10.102.982.068,00	(944.698.373,00)	91,45
Badan Ketahanan Pangan	10.607.287.856,00	9.089.545.819,00	(1.517.742.037,00)	85,69
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	8.864.504.899,00	7.965.571.624,00	(898.933.275,00)	89,86
Jumlah	2.594.590.259.211,85	2.399.665.054.772,46	(194.925.204.439,39)	92,49

Sementara untuk Belanja Urusan Pilihan dari anggaran yang tersedia sebesar Rp171.982.960.662,00 dengan tingkat realisasi 92,33 persen atau setara dengan Rp158.793.132.883,00, maka SKPD dengan realisasi terendah adalah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 87,83 persen dan SKPD dengan realisasi tertinggi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tingkat realisasi sebesar 99,01 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini.

Gambar 3.2 Grafik Realisasi Pelaksanaan Anggaran Urusan Pilihan



Tahun 2012

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi (Data Diolah)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) unit kerja yang tingkat realisasinya berada di bawah rata-rata atau dengan tingkat realisasi di bawah 92,00 persen. Sementara untuk realisasi di atas 92,00 persen terdapat pada 7 (tujuh) SKPD. Untuk lebih lengkapnya realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pilihan per SKPD Tahun 2012

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan	31.055.734.592,00	29.692.674.610,00	(1.363.059.982,00)	95,61
Dinas Perkebunan	43.677.331.474,00	39.993.052.937,00	(3.684.278.537,00)	91,56
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	19.346.005.960,00	18.100.028.734,00	(1.245.977.226,00)	93,56
Dinas Kehutanan	20.922.917.192,00	18.946.006.429,00	(1.976.910.763,00)	90,55
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.017.200.976,00	6.557.941.103,00	(459.259.873,00)	93,46
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.645.324.450,00	2.498.366.402,00	(146.958.048,00)	94,44
Dinas Kelautan dan Perikanan	26.932.656.927,00	23.655.453.494,00	(3.277.203.433,00)	87,83
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.477.933.000,00	1.426.170.600,00	(51.762.400,00)	96,50
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.668.735.041,00	16.696.579.379,00	(972.155.662,00)	94,50
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.239.121.050,00	1.226.859.195,00	(12.261.855,00)	99,01
Jumlah	171.982.960.662,00	158.793.132.883,00	(13.189.827.779,00)	92,33

3.2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja tidak terduga. Secara total belanja tidak langsung Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp1.295.848.887.154,85 dan terealisasi sebesar Rp1.194.875.358.485,46 atau setara dengan 92,21 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun 2012

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Proporsi (%)	
		(Rp)	(%)	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	477.413.747.518,00	447.059.229.787,00	93,64	36,84	37,41
Belanja Subsidi	292.000.000,00	237.500.000,00	81,34	0,02	0,02
Belanja Hibah	356.592.340.000,00	339.330.947.000,00	95,16	27,52	28,40
Belanja Bantuan Sosial	65.500.450.000,00	32.075.500.000,00	48,97	5,05	2,68
Belanja Bagi Hasil	306.383.149.636,65	298.917.433.020,71	97,56	23,64	25,02
Belanja Bantuan Keuangan	79.667.200.000,00	74.860.635.677,75	93,97	6,15	6,27
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	2.394.113.000,00	23,94	0,77	0,20
Jumlah	1.295.848.887.154,65	1.194.875.358.485,46	92,21	100,00	100,00

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa untuk belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi, yaitu sebesar 97,56 persen dari total anggaran sebesar Rp306.383.149.636,65 dan untuk belanja tidak terduga merupakan belanja dengan tingkat realisasi terendah, yaitu sebesar 23,94 persen dari total anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00. Selanjutnya jika kita lihat proporsi anggaran belanja tidak langsung tersebut, diketahui bahwa belanja pegawai merupakan jenis belanja dengan proporsi

anggaran terbesar, yaitu sebesar 36,84 persen atau sebesar Rp477.413.747.518,00 dari total anggaran pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp1.295.848.887.154,65.

Selanjutnya jika dibandingkan belanja tidak langsung pada tahun 2012 dengan tahun 2011, secara total terjadi peningkatan alokasi anggaran sebesar 60,03 persen dari Rp809.763.763.276,35 pada tahun 2011, meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp1.295.848.887.154,65. Secara signifikan peningkatan pada belanja tidak langsung terdapat pada belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Peningkatan ini pada dasarnya merupakan dampak dari diserahkan berbagai urusan pembangunan yang penanganannya merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan didaerhkannya anggaran untuk pelaksanaan Program SAMISAKE kepada Kabupaten/Kota. Disisi lain, terjadi penurunan alokasi anggaran belanja tidak langsung untuk belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga sebagaimana tertera pada tabel di atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel. 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2011-2012

Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)		Perubahan Anggaran (%)	Realisasi (%)	
	2011	2012	2011	2012		2011	2012
Belanja Pegawai	418.636.543.580,35	477.413.747.518,00	386.627.384.548,00	447.059.229.787,00	14,04	92,35	93,64
Belanja Subsidi	370.000.000,00	292.000.000,00	135.000.000,00	237.500.000,00	(21,08)	36,49	81,34
Belanja Hibah	25.058.147.248,00	356.592.340.000,00	22.187.375.500,00	339.330.947.000,00	1.323,06	88,54	95,16
Belanja Bantuan Sosial	59.969.300.000,00	65.500.450.000,00	55.988.739.100,00	32.075.500.000,00	9,22	93,36	48,97
Belanja Bagi Hasil	291.424.772.448,00	306.383.149.636,65	291.345.987.149,83	298.917.433.020,71	5,13	99,97	97,56
Belanja Bantuan Keuangan	935.000.000,00	79.667.200.000,00	929.835.448,00	74.860.635.677,75	8.420,56	99,45	93,97
Belanja Tidak Terduga	13.370.000.000,00	10.000.000.000,00	3.125.150.000,00	2.394.113.000,00	(25,21)	23,37	23,94
Jumlah	809.763.763.276,35	1.295.848.887.154,65	760.339.471.745,83	1.194.875.358.485,46	60,03	93,90	92,21

Sumber : Biro Keuangan setda. Provinsi Jambi (Data Diolah)

3.2.2.2 Belanja Langsung

Komponen utama Belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan setiap tahunnya. Proporsi anggaran belanja langsung untuk tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp1.470.724.332.719,00 dari total belanja Rp2.766.573.219.873,85 atau setara dengan 53,16 persen dari total anggaran belanja daerah.

Jika dibandingkan antara anggaran belanja langsung tahun 2011 dengan tahun 2012, terjadi peningkatan alokasi sebesar 30,25 persen dari Rp1.129.163.000.460,00 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp1.470.724.332.719,00 pada tahun 2012. Dari total tersebut, untuk belanja pegawai meningkat sebesar 22,01 persen, belanja barang dan jasa meningkat 48,27 persen dan untuk belanja modal meningkat sebesar 18,17 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2011-2012

Uraian	Anggaran (Rp)		Proporsi (%)		Realisasi (Rp)		Realisasi (%)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Belanja Pegawai	73.462.531.692,00	89.630.370.020,00	6,51	6,09	68.132.245.607,00	84.157.928.635,00	92,74	93,89
Belanja Barang dan Jasa	443.670.280.331,00	657.840.900.069,00	39,29	44,73	403.019.557.757,50	596.658.216.661,00	90,84	90,70
Belanja Modal	612.030.188.437,00	723.253.062.630,00	54,20	49,18	518.750.581.050,00	682.766.683.874,00	84,76	94,40
Jumlah	1.129.163.000.460,00	1.470.724.332.719,00	100,00	100,00	989.902.384.414,50	1.363.582.829.170,00	87,67	92,72

Sumber : Biro Keuangan Setda, Provinsi Jambi

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa proporsi alokasi anggaran untuk jenis belanja barang dan jasa meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana untuk tahun 2012 dialokasikan sebesar 44,73 persen dan meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang dialokasikan sebesar

39,29 persen. Sementara untuk belanja pegawai terjadi penurunan dari 6,51 persen pada tahun 2011 dan menurun pada tahun 2012 menjadi 6,09 persen, begitu juga dengan belanja modal terjadi penurunan alokasi anggaran dari 54,20 persen pada tahun 2011 menurun menjadi 49,18 persen di tahun 2012.

Selanjutnya dari total belanja langsung tersebut, dialokasikan untuk belanja langsung sebesar 93,19 persen atau setara dengan Rp1.370.577.094.389,00 dan sebesar Rp100.147.238.330,00 dialokasikan untuk belanja tidak langsung atau setara dengan 6,81 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.13 Rincian Belanja Langsung Tahun 2012

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah
Urusan Wajib	84.585.271.620,00	587.142.494.139,00	698.849.328.630,00	1.370.577.094.389,00
Urusan Pilihan	5.045.098.400,00	70.698.405.930,00	24.403.734.000,00	100.147.238.330,00
Jumlah	89.630.370.020,00	657.840.900.069,00	723.253.062.630,00	1.470.724.332.719,00

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi

Selanjutnya tabel di atas juga memperlihatkan bahwa dari total belanja langsung tersebut, sebesar 6,09 persen atau setara dengan Rp89.630.370.020,00 dialokasikan untuk belanja pegawai, dan sebesar 44,73 persen atau setara dengan Rp657.840.900.069,00 dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, serta sebesar 49,18 persen atau setara dengan Rp723.253.062.630,00 dialokasikan untuk belanja modal.

Dari total anggaran belanja langsung urusan wajib sebagaimana yang diperlihatkan pada Tabel 3.13 tersebut, secara total realisasi anggaran urusan wajib terealisasi sebesar Rp1.272.960.577.355,00 atau setara dengan 92,88

persen. Sementara untuk urusan pilihan dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp100.147.238.330,00 atau terealisasi sebesar 90,49 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.14 di bawah ini.

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)
I. Urusan Wajib				
Dinas Pendidikan Provinsi iambi	201.311.101.479,00	183.173.627.433,00	(18.137.474.046,00)	90,99
Belanja Pegawai	10.841.205.000,00	9.940.067.700,00	(901.137.300,00)	91,69
Belanja Barang dan Jasa	177.088.324.479,00	160.711.067.263,00	(16.377.257.216,00)	90,75
Belanja Modal	13.381.572.000,00	12.522.492.470,00	(859.079.530,00)	93,58
Dinas Kesehatan Provinsi iambi	28.109.351.290,00	28.898.575.220,00	789.223.930,00	102,81
Belanja Pegawai	2.210.628.000,00	2.509.158.175,00	298.530.175,00	113,50
Belanja Barang dan Jasa	23.123.370.125,00	23.594.461.895,00	471.091.770,00	102,04
Belanja Modal	2.775.353.165,00	2.794.955.150,00	19.601.985,00	100,71
Rumah Sakit Daerah Provinsi iambi	84.182.954.065,00	78.383.631.525,00	(5.799.322.540,00)	93,11
Belanja Pegawai	27.894.791.000,00	27.148.224.176,00	(746.566.824,00)	97,32
Belanja Barang dan Jasa	36.496.141.545,00	33.768.642.174,00	(2.727.499.371,00)	92,53
Belanja Modal	19.792.021.520,00	17.466.765.175,00	(2.325.256.345,00)	88,25
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi iambi	19.089.355.773,00	18.091.333.722,00	(998.022.051,00)	94,77
Belanja Pegawai	1.696.208.900,00	1.614.555.850,00	(81.653.050,00)	95,19
Belanja Barang dan Jasa	10.130.202.573,00	9.677.892.184,00	(452.310.389,00)	95,54
Belanja Modal	7.262.944.300,00	6.798.885.688,00	(464.058.612,00)	93,61
Dinas Pekerjaan Umum	609.292.467.427,00	575.520.724.040,00	(33.771.743.387,00)	94,46
Belanja Pegawai	1.572.537.400,00	1.393.584.220,00	(178.953.180,00)	88,62
Belanja Barang dan Jasa	46.518.694.300,00	42.049.481.125,00	(4.469.213.175,00)	90,39
Belanja Modal	561.201.235.727,00	532.077.658.695,00	(29.123.577.032,00)	94,81
Dinas Pekerjaan Umum	55.678.938.000,00	54.313.288.927,00	(1.365.649.073,00)	97,55
Belanja Barang dan Jasa	50.013.000.000,00	48.915.418.327,00	(1.097.581.673,00)	97,81
Belanja Modal	5.665.938.000,00	5.397.870.600,00	(268.067.400,00)	95,27

Lanjutan.

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)
BAPPEDA	17.351.822.850,00	16.204.354.283,00	(1.147.468.567,00)	93,39
Belanja Pegawai	2.019.125.000,00	1.858.072.000,00	(161.053.000,00)	92,02
Belanja Barang dan Jasa	10.410.762.350,00	9.612.997.009,00	(797.765.341,00)	92,34
Belanja Modal	4.921.935.500,00	4.733.285.274,00	(188.650.226,00)	96,17
Dinas Perhubungan	33.047.333.000,00	30.631.884.281,00	(2.415.448.719,00)	92,69
Belanja Pegawai	859.989.000,00	651.170.000,00	(208.819.000,00)	75,72
Belanja Barang dan Jasa	9.930.809.000,00	8.691.183.227,00	(1.239.625.773,00)	87,52
Belanja Modal	22.256.535.000,00	21.289.531.054,00	(967.003.946,00)	95,66
Badan Lingkungan Hidup	6.610.073.400,00	6.601.343.466,00	(8.729.934,00)	99,87
Belanja Pegawai	202.042.500,00	186.257.500,00	(15.785.000,00)	92,19
Belanja Barang dan Jasa	5.027.384.400,00	4.909.446.166,00	(117.938.234,00)	97,65
Belanja Modal	1.380.646.500,00	1.505.639.800,00	124.993.300,00	109,05
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberday	8.488.087.000,00	7.956.167.555,00	(531.919.445,00)	93,73
Belanja Pegawai	693.875.000,00	647.765.000,00	(46.110.000,00)	93,35
Belanja Barang dan Jasa	7.131.222.000,00	6.669.876.555,00	(461.345.445,00)	93,53
Belanja Modal	662.990.000,00	638.526.000,00	(24.464.000,00)	96,31
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.100.436.795,00	3.508.195.490,00	(592.241.305,00)	85,56
Belanja Pegawai	537.126.250,00	498.607.000,00	(38.519.250,00)	92,83
Belanja Barang dan Jasa	2.912.110.545,00	2.385.841.490,00	(526.269.055,00)	81,93
Belanja Modal	651.200.000,00	623.747.000,00	(27.453.000,00)	95,78
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.809.611.715,00	15.701.243.198,00	(1.108.368.517,00)	93,41
Belanja Pegawai	2.434.729.000,00	2.403.135.000,00	(31.594.000,00)	98,70
Belanja Barang dan Jasa	10.125.334.407,00	9.432.362.438,00	(692.971.969,00)	93,16
Belanja Modal	4.249.548.308,00	3.865.745.760,00	(383.802.548,00)	90,97

Lanjutan.

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9.169.814.960,00	8.095.491.206,00	(1.074.323.754,00)	88,28
Belanja Pegawai	447.040.000,00	425.036.500,00	(22.003.500,00)	95,08
Belanja Barang dan Jasa	8.416.274.960,00	7.365.380.106,00	(1.050.894.854,00)	87,51
Belanja Modal	306.500.000,00	305.074.600,00	(1.425.400,00)	99,53
BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu	3.735.458.400,00	3.369.265.935,00	(366.192.465,00)	90,20
Belanja Pegawai	255.905.000,00	237.714.000,00	(18.191.000,00)	92,89
Belanja Barang dan Jasa	3.279.571.400,00	2.945.801.935,00	(333.769.465,00)	89,82
Belanja Modal	199.982.000,00	185.750.000,00	(14.232.000,00)	92,88
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.266.788.550,00	8.365.811.496,00	(900.977.054,00)	90,28
Belanja Pegawai	1.983.612.300,00	1.857.457.900,00	(126.154.400,00)	93,64
Belanja Barang dan Jasa	6.555.058.750,00	5.854.019.196,00	(701.039.554,00)	89,31
Belanja Modal	728.117.500,00	654.334.400,00	(73.783.100,00)	89,87
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	24.995.003.100,00	24.102.389.696,00	(892.613.404,00)	96,43
Belanja Pegawai	6.514.509.000,00	6.331.006.500,00	(183.502.500,00)	97,18
Belanja Barang dan Jasa	16.097.076.560,00	15.481.080.196,00	(615.996.364,00)	96,17
Belanja Modal	2.383.417.540,00	2.290.303.000,00	(93.114.540,00)	96,09
Satuan Polisi Pamong Praja	5.010.415.400,00	4.536.411.181,00	(474.004.219,00)	90,54
Belanja Pegawai	1.489.524.000,00	1.437.274.000,00	(52.250.000,00)	96,49
Belanja Barang dan Jasa	3.089.541.400,00	2.679.752.781,00	(409.788.619,00)	86,74
Belanja Modal	431.350.000,00	419.384.400,00	(11.965.600,00)	97,23
Badan Kesbangpol	5.550.958.350,00	5.304.708.237,00	(246.250.113,00)	95,56
Belanja Pegawai	791.570.000,00	758.140.000,00	(33.430.000,00)	95,78
Belanja Barang dan Jasa	3.738.838.350,00	3.541.097.437,00	(197.740.913,00)	94,71
Belanja Modal	1.020.550.000,00	1.005.470.800,00	(15.079.200,00)	98,52

Lanjutan.

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)
Sekretariat Daerah	113.545.234.700,00	99.465.696.881,00	(14.079.537.819,00)	87,60
Belanja Pegawai	12.911.001.820,00	11.583.797.200,00	(1.327.204.620,00)	89,72
Belanja Barang dan Jasa	75.809.534.330,00	64.393.872.331,00	(11.415.661.999,00)	84,94
Belanja Modal	24.824.698.550,00	23.488.027.350,00	(1.336.671.200,00)	94,62
Sekretariat Dewan	33.335.155.000,00	28.865.268.580,00	(4.469.886.420,00)	86,59
Belanja Pegawai	2.161.227.000,00	1.753.121.654,00	(408.105.346,00)	81,12
Belanja Barang dan Jasa	27.687.378.000,00	23.768.363.226,00	(3.919.014.774,00)	85,85
Belanja Modal	3.486.550.000,00	3.343.783.700,00	(142.766.300,00)	95,91
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.736.660.570,00	4.413.394.115,00	(323.266.455,00)	93,18
Belanja Pegawai	925.415.000,00	902.164.160,00	(23.250.840,00)	97,49
Belanja Barang dan Jasa	3.158.260.570,00	2.874.064.955,00	(284.195.615,00)	91,00
Belanja Modal	652.985.000,00	637.165.000,00	(15.820.000,00)	97,58
Inspektorat Provinsi	6.704.501.150,00	6.295.882.956,00	(408.618.194,00)	93,91
Belanja Pegawai	384.544.000,00	303.099.000,00	(81.445.000,00)	78,82
Belanja Barang dan Jasa	6.319.957.150,00	5.992.783.956,00	(327.173.194,00)	94,82
Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Iambi	9.875.797.045,00	8.837.121.656,00	(1.038.675.389,00)	89,48
Belanja Pegawai	916.731.000,00	901.061.000,00	(15.670.000,00)	98,29
Belanja Barang dan Jasa	8.132.211.700,00	7.143.767.898,00	(988.443.802,00)	87,85
Belanja Modal	826.854.345,00	792.292.758,00	(34.561.587,00)	95,82
Dinas Pendapatan Provinsi Iambi	19.481.273.520,00	16.564.207.968,00	(2.917.065.552,00)	85,03
Belanja Pegawai	556.910.000,00	481.003.000,00	(75.907.000,00)	86,37
Belanja Barang dan Jasa	12.613.663.520,00	10.115.970.868,00	(2.497.692.652,00)	80,20
Belanja Modal	6.310.700.000,00	5.967.234.100,00	(343.465.900,00)	94,56

Lanjutan.

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)
Sekretariat KORPRI	1.712.157.820,00	1.372.557.559,00	(339.600.261,00)	80,17
Belanja Pegawai	367.320.000,00	281.900.000,00	(85.420.000,00)	76,75
Belanja Barang dan Jasa	1.234.914.420,00	988.844.559,00	(246.069.861,00)	80,07
Belanja Modal	109.923.400,00	101.813.000,00	(8.110.400,00)	92,62
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	10.869.998.660,00	9.940.741.722,00	(929.256.938,00)	91,45
Belanja Pegawai	950.560.000,00	830.760.750,00	(119.799.250,00)	87,40
Belanja Barang dan Jasa	4.222.423.830,00	3.791.723.072,00	(430.700.758,00)	89,80
Belanja Modal	5.697.014.830,00	5.318.257.900,00	(378.756.930,00)	93,35
Badan Kepegawaian Daerah	6.305.722.900,00	4.005.430.085,00	(2.300.292.815,00)	63,52
Belanja Pegawai	870.025.000,00	543.314.000,00	(326.711.000,00)	62,45
Belanja Barang dan Jasa	5.057.653.075,00	3.089.819.085,00	(1.967.833.990,00)	61,09
Belanja Modal	378.044.825,00	372.297.000,00	(5.747.825,00)	98,48
KPID	2.799.037.620,00	2.632.722.301,00	(166.315.319,00)	94,06
Belanja Pegawai	543.815.000,00	526.155.000,00	(17.660.000,00)	96,75
Belanja Barang dan Jasa	1.482.853.000,00	1.344.524.301,00	(138.328.699,00)	90,67
Belanja Modal	772.369.620,00	762.043.000,00	(10.326.620,00)	98,66
Kantor Pengolahan Data Elektronik	6.814.318.200,00	6.608.010.088,00	(206.308.112,00)	96,97
Belanja Pegawai	293.530.000,00	283.934.000,00	(9.596.000,00)	96,73
Belanja Barang dan Jasa	2.014.219.200,00	1.971.569.888,00	(42.649.312,00)	97,88
Belanja Modal	4.506.569.000,00	4.352.506.200,00	(154.062.800,00)	96,58
Badan Perpustakaan dan Arsip	3.924.255.400,00	3.470.222.607,00	(454.032.793,00)	88,43
Belanja Pegawai	463.430.450,00	443.981.000,00	(19.449.450,00)	95,80
Belanja Barang dan Jasa	2.505.504.950,00	2.151.661.607,00	(353.843.343,00)	85,88
Belanja Modal	955.320.000,00	874.580.000,00	(80.740.000,00)	91,55
Badan Ketahanan Pangan	4.353.969.000,00	3.936.145.937,00	(417.823.063,00)	90,40
Belanja Pegawai	368.404.000,00	330.226.000,00	(38.178.000,00)	89,64
Belanja Barang dan Jasa	3.664.940.000,00	3.295.654.437,00	(369.285.563,00)	89,92
Belanja Modal	320.625.000,00	310.265.500,00	(10.359.500,00)	96,77
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	4.319.041.250,00	3.794.728.009,00	(524.313.241,00)	87,86
Belanja Pegawai	427.941.000,00	382.373.850,00	(45.567.150,00)	89,35
Belanja Barang dan Jasa	3.155.263.250,00	2.686.755.159,00	(468.508.091,00)	85,15
Belanja Modal	735.837.000,00	725.599.000,00	(10.238.000,00)	98,61
Jumlah I	1.370.577.094.389,00	1.272.960.577.355,00	(195.233.034.068,00)	92,88

Lanjutan

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)
II. Urusan Pilihan				
Dinas Pertanian Tanaman Pangan	11.657.411.800,00	10.830.308.154,00	(827.103.646,00)	92,90
Belanja Pegawai	1.022.865.000,00	985.636.000,00	(37.229.000,00)	96,36
Belanja Barang dan Jasa	8.154.883.700,00	7.525.068.554,00	(629.815.146,00)	92,28
Belanja Modal	2.479.663.100,00	2.319.603.600,00	(160.059.500,00)	93,55
Dinas Perkebunan	32.715.564.530,00	30.098.519.735,00	(2.617.044.795,00)	92,00
Belanja Pegawai	466.929.000,00	439.625.000,00	(27.304.000,00)	94,15
Belanja Barang dan Jasa	29.041.390.530,00	26.616.426.735,00	(2.424.963.795,00)	91,65
Belanja Modal	3.207.245.000,00	3.042.468.000,00	(164.777.000,00)	94,86
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.785.709.500,00	11.005.181.677,00	(780.527.823,00)	93,38
Ref anja Pegawai	956.839.000,00	938.600.000,00	(18.239.000,00)	98,09
Belanja Barang dan Jasa	6.826.615.500,00	6.235.554.677,00	(591.060.823,00)	91,34
Belanja Modal	4.002.255.000,00	3.831.027.000,00	(171.228.000,00)	95,72
Dinas Kehutanan	10.619.814.400,00	9.312.967.861,00	(1.306.846.539,00)	87,69
Belanja Pegawai	496.855.000,00	395.130.500,00	(101.724.500,00)	79,53
Belanja Barang dan Jasa	7.695.735.400,00	6.655.622.511,00	(1.040.112.889,00)	86,48
Belanja Modal	2.427.224.000,00	2.262.214.850,00	(165.009.150,00)	93,20
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.180.647.500,00	2.878.763.619,00	(301.883.881,00)	90,51
Belanja Pegawai	195.679.400,00	188.919.000,00	(6.760.400,00)	96,55
Belanja Barang dan Jasa	2.544.058.100,00	2.434.099.719,00	(109.958.381,00)	95,68
Belanja Modal	440.910.000,00	255.744.900,00	(185.165.100,00)	58,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.645.324.450,00	2.498.366.402,00	(146.958.048,00)	94,44
Belanja Pegawai	47.740.000,00	28.010.000,00	(19.730.000,00)	58,67
Belanja Barang dan Jasa	2.343.584.450,00	2.218.214.402,00	(125.370.048,00)	94,65
Belanja Modal	254.000.000,00	252.142.000,00	(1.858.000,00)	99,27

Lanjutan.

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)
Dinas Kelautan dan Perikanan	18.241.735.000,00	15.215.245.843,00	(3.026.489.157,00)	83,41
Belanja Pegawai	1.019.914.000,00	980.869.000,00	(39.045.000,00)	96,17
Belanja Barang dan Jasa	7.140.371.000,00	6.502.858.443,00	(637.512.557,00)	91,07
Belanja Modal	10.081.450.000,00	7.731.518.400,00	(2.349.931.600,00)	76,69
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.477.933.000,00	1.426.170.600,00	(51.762.400,00)	96,50
Belanja Pegawai	76.608.000,00	75.839.000,00	(769.000,00)	99,00
Belanja Barang dan Jasa	1.377.450.000,00	1.327.264.600,00	(50.185.400,00)	96,36
Belanja Modal	23.875.000,00	23.067.000,00	(808.000,00)	96,62
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.583.977.100,00	6.129.868.729,00	(454.108.371,00)	93,10
Belanja Pegawai	748.629.000,00	668.144.000,00	(80.485.000,00)	89,25
Belanja Barang dan Jasa	4.348.236.200,00	4.034.110.979,00	(314.125.221,00)	92,78
Belanja Modal	1.487.111.900,00	1.427.613.750,00	(59.498.150,00)	96,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.239.121.050,00	1.226.859.195,00	(12.261.855,00)	99,01
Belanja Pegawai	13.040.000,00	13.040.000,00	-	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.226.081.050,00	1.213.819.195,00	(12.261.855,00)	99,00
Jumlah II	100.147.238.330,00	90.622.251.815,00	(9.524.986.515,00)	90,49
Jumlah I + II	1.470.724.332.719,00	1.363.582.829.170,00	(204.758.020.583,00)	92,72

Sumber : Biro Keuangan Setda. Provinsi Jambi